

# Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih)

---

Muhammad Rizki Fayad<sup>1)</sup>, Saladin Ghalib<sup>1)</sup> dan Fitriyadi<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ilmu Administrasi Bisnis/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat  
Alamat Email : [yylfrodtd@gmail.com](mailto:yylfrodtd@gmail.com)

**ABSTRACT :** *This research aims to understand and see the practice of good corporate governance principle in Bandarmasih local water company as one of the companies effort to achieve they vision and mission and in they attempt to fulfill stakeholders expectancy, also giving an overview of the practice good corporate governance which are transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality according to the basic guidelines good corporate governance of Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). This research is using qualitative method, with snowball sampling to determine the informant. Data were gathered by interview, observation and document studies. Furthermore, the analysis technique done by data reduction, data preservation, and conclusion. The result is Bandarmasih local water company has applying the GCG principle well in running the company.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*

## PENDAHULUAN

PDAM Bandarmasih sebagai perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan air di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih dengan kualitas yang layak konsumsi. Air merupakan hal penting bagi kehidupan manusia sehari-hari, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, tidak akan ada jika tidak ada air, dan juga kendaraan, bahan bakar yang menggerakannya juga memerlukan air. Kebutuhan yang besar akan air diperlukan untuk memproduksi hampir semua barang dan jasa. Mengingat betapa pentingnya air akan kehidupan masyarakat dan pelaku bisnis, PDAM Bandarmasih diwajibkan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air kepada seluruh konsumennya, saat ini PDAM Bandarmasih memiliki jumlah pelanggan sebesar 176.858 dan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan masyarakat, perkembangan pembangunan perumahan serta industri yang terus meningkat.

Tujuan perusahaan daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, serta menuju masyarakat adil dan makmur. Perusahaan Daerah Air Minum berbeda dengan perusahaan swasta yang orientasinya pada keuntungan (profit oriented) semata. PDAM memiliki tujuan untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan cara menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam keputusan menteri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PDAM memerlukan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Mengingat keberadaan PDAM dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari uang masyarakat (*public fund*), maka dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam aspek penyampaian informasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Selain itu, prinsip responsibilitas juga harus diterapkan, PDAM diharuskan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan yang masuk dalam ruang lingkup kegiatan bisnisnya. Hal tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk memegang teguh kepada etika bisnis dalam beroperasi dan mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para karyawan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Prinsip independensi diharuskan untuk diterapkan PDAM Bandarmasih guna menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), karena kepemilikan PDAM Bandarmasih dipegang oleh Pemerintah Kota terpisah dengan pengurus perusahaan yang dipegang oleh pihak yang dianggap layak untuk menjalankan perusahaan tersebut. Sehingga dalam pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara subyektif dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, tidak ada dominasi dan intervensi dari pihak lain. Yang terakhir prinsip kewajaran dan kesetaraan, dalam menjalankan usahanya PDAM Bandarmasih diharuskan untuk selalu memperhatikan dan memperlakukan kepentingan para *stakeholders* dengan adil.

Pada tahun 2015 PDAM Bandarmasih melaksanakan kegiatan penyerahan empat dokumen GCG yang berupa Pedoman Dewan Pengawas, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku dan Piagam SPI yang diserahkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan Sumitro, kepada Direktur PDAM Bandarmasih Muslih yang masih menjabat pada saat itu. Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir selesainya penugasan penyusunan dan pengembangan dokumen GCG pada PDAM Bandarmasih. Ini membuktikan bahwa PDAM Bandarmasih memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada tahun tersebut. Setelah kegiatan tersebut, pada tahun berikutnya, performa keuangan PDAM Bandarmasih mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 laba PDAM Bandarmasih meningkat lebih dari tiga kali lipat. Berdasarkan Pada tahun 2015 PDAM Bandarmasih melaksanakan kegiatan penyerahan empat dokumen GCG yang berupa Pedoman Dewan Pengawas, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku dan Piagam SPI yang diserahkan Kepala BPKP Kalsel Sumitro, kepada Direktur PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Muslih yang masih menjabat pada saat itu. Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir selesainya penugasan penyusunan dan pengembangan dokumen GCG pada PDAM Bandarmasih. Ini membuktikan bahwa PDAM Bandarmasih memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada tahun tersebut.

Hal tersebut membuat penulis mengindikasikan bahwa penerapan GCG meningkatkan performa keuangan PDAM Bandarmasih, karena pada dua tahun sebelum penerapan GCG di PDAM Bandarmasih laba yang diraih pada tahun 2013 sebesar 4 (empat) Milyar dan pada tahun 2014 sebesar 1 (satu) Milyar, peningkatan performa keuangan PDAM Bandarmasih terjadi setelah penerapan GCG pada tahun 2015.

Tabel 1.1 Laba Bersih PDAM Bandarmasih periode 2013-2017

Tahun	Laba
2013	IDR 4,776,979,627
2014	IDR 1,620,922,034
2015	IDR 5,295,898,236
2016	IDR 16,804,507,978
2017	IDR 7,991,335,618

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Bandarmasih

Penelitian mengenai penerapan prinsip GCG telah dilakukan yang dimana hasilnya tingkat penerapan prinsip GCG di berbagai perusahaan beragam tingkatannya. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Adienda Rizkya Yustika Saman dan Riska Nur Rosyidiana, SE., M.Ak (2019), melakukan penelitian di PT. Terminal Teluk Lamong yang hasilnya menyatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan indenpendensi belum diterapkan, prinsip pertanggungjawaban belum sepenuhnya dijalankan dan kewajaran dilaksanakan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Mediaty *et al* (2016) pada PT Nusantara Infrastruktur Tbk, hasilnya menyatakan bahwa secara keseluruhan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dengan baik. Penelitian yang dilakukan Sally Marcelina Djauhari dan Parulian Sihotang (2010) menyatakan bahwa 30 BUMN yang masuk daftar telah mengimplementasikan prinsip GCG. Akan tetapi tingkat penerapannya tiap perusahaan berbeda. Penelitian lain yang membahas mengenai pelaksanaan praktik gcg pada PDAM di Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Dewi Fitriyani *et al* (2014), menyatakan bahwa PDAM di Provinsi Jambi belum sepenuhnya melaksanakan Good Corporate Governance, diantaranya dikarenakan sebagian besar PDAM belum memiliki pedoman tata kelola perusahaan.

## TINJAUAN TEORI

### 1. *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Harmanto Edy Djatmiko, 2001).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dalam I Nyoman Tjager *et al.*, 2003) mendefinisikan *corporate governance* dalam arti luas, yaitu sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”

### 2. Prinsip Dasar GCG

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006:5) Prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

#### 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## METODE PENELITIAN

pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang pengkajian atau metode penelitian terhadap suatu masalah yang tidak didesain atau dirancang menggunakan prosedur-prosedur statistik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual yang kemudian dianalisis secara kualitatif

Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di PDAM Bandarmasih dimulai pada tahun 2016 atau saat Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menjabat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi Data primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui

studi pustaka, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung, dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dengan prosedur, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Transparansi

Pada prinsip transparansi, PDAM Bandarmasih telah menerapkannya sesuai pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG. Akan tetapi pada panduan untuk mengungkapkan sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya belum signifikan diterapkan. PDAM Bandarmasih tidak mengungkapkan informasi mengenai sistem GCG pada situs jaringan yang dimilikinya ([www.pdambandarmasih.com](http://www.pdambandarmasih.com)). Padahal pengungkapan sistem dan pelaksanaan GCG tersebut kepada publik akan menciptakan citra baik perusahaan karena telah menerapkan GCG. Saat ini informasi mengenai GCG di PDAM Bandarmasih hanya dapat diakses di Kantor Satuan Pengawas Internal. Ini yang menyebabkan penulis beranggapan bahwa PDAM Bandarmasih belum signifikan terbuka mengenai sistem dan pelaksanaan GCG.

Selain itu untuk tingkat kepatuhan pelaksanaan GCG, PDAM Bandarmasih belum dapat menampilkan hasilnya, padahal pelaksanaan penilaian atas tingkat kepatuhan akan GCG dapat melihat apa saja kekurangan yang terdapat di perusahaan untuk dievaluasi apa yang dirasa menjadi kekurangan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaan, padahal dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan COCG (*Code of Corporate Governance*) PDAM Bandarmasih menyatakan bahwa Direksi membentuk Tim GCG untuk memastikan ketaatan terhadap aturan GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Pengawas, akan tetapi pelaporan tersebut belum dijalankan, mereka hanya melaksanakan monitoring terhadap tindakan-tindakan yang diluar Pedoman Tata Kelola Perusahaan COCG (*Code of Corporate Governance*) PDAM Bandarmasih dan menindaklanjutinya. Selain itu pedoman mengenai pelaksanaan GCG di PDAM Bandarmasih sampai saat ini belum ada pembaharuan, untuk pedomannya tersebut masih dalam pengesahan direktur utama sebelumnya yang menjabat dan dalam periode kepemimpinan direktur utama yang saat ini menjabat belum ada pembaruan dalam pedoman tersebut. Walaupun belum dirasa ada pembaharuan pada pedoman tersebut, direktur utama yang menjabat diharapkan dapat mengesahkan pedoman yang baru sebagai wujud komitmen perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Meskipun sudah memiliki situs jaringan sebagai media informasi perusahaan kepada publik, menurut observasi penulis penggunaannya belum maksimal meskipun sudah mencakup beberapa informasi dengan jelas akan tetapi masih terdapat beberapa informasi yang belum terkini dan termuat seperti sistem pelaksanaan GCG, struktur perusahaan, uraian tugas dan laporan keuangan. Penggunaan situs jaringan yang maksimal dengan memuat informasi yang sudah sepatutnya disampaikan akan membuat perusahaan benar-benar transparan kepada khalayak publik dan stakeholder dan dengan lebih mudah mengakses informasi tersebut.

Dalam menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, PDAM Bandarmasih telah menerapkannya dengan baik, terutama dalam penyampaian laporan keuangannya yang mendapatkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian selama delapan tahun secara berturut-turut, serta setiap kebijakan akan disampaikan secara proporsional dan jelas melalui pengumuman, sosial media, dan situs jaringan, sementara informasi internal perusahaan dengan jelas dan mudah didapat dan disampaikan dalam forum rapat dan upacara yang dilakukan setiap pagi sebelum memulai aktifitas kerja. Dan dalam setiap pengambilan keputusannya, PDAM melibatkan semua organ perusahaan yang terkait serta merangkul stakeholder dalam pembuatan keputusan demi menjaga objektivitas dan menghindari konflik.

### 2. Akuntabilitas

PDAM Bandarmasih telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, dapat dilihat pada susunan organisasi dan tata kerja PDAM Bandarmasih yang jelas serta pembagian uraian jabatan yang memudahkan kegiatan operasional kantor maupun lapangan. Setiap departemen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian jabatan dan SOP yang diterapkan serta koordinasi antar departemen yang baik pula, selain itu peranan pemimpin yang besar, yakni Direktur Utama PDAM Bandarmasih.

Dalam pengambilan keputusan, setiap unsur yang terlibat akan diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan mendengarkan saran maupun pendapatnya masing-masing.

Dalam penempatan karyawan PDAM Bandarmasih menurut pandangan penulis telah sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan, sebelum dilaksanakan penempatan karyawan dilihat latar belakang dan dilakukan proses mapping, dan dalam pengerjaannya selalu diawasi oleh SPI agar selalu tetap dalam uraian jabatan yang dipegangnya. Bahkan demi menghindari karyawan yang memiliki rasa jenuh dan bosan serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dalam pengerjaannya, PDAM Bandarmasih melaksanakan mutasi jabatan.

PDAM Bandarmasih telah memastikan adanya Sistem Pengendalian Internal, akan tetapi dari hasil wawancara, Sistem Pengendalian Internal di PDAM Bandarmasih masih terbatas dalam segi SDM. Akan tetapi menurut penulis SPI PDAM Bandarmasih meski kekurangan dalam segi SDM mereka bisa dengan efektif menjalankan tugasnya dalam melaksanakan audit dan pengawasan. Adapun dalam ukuran kinerja kepada jajaran perusahaan PDAM Bandarmasih telah memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dan setiap organ perusahaan dan semua karyawan diwajibkan untuk berpegang kepada Pedoman Etika Usaha dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disepakati.

### 3. **Responsibilitas**

PDAM Bandarmasih telah melaksanakannya dengan cukup baik, meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya, untuk panduan dalam berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan terkadang masih terjadi tindakan yang melanggar pada peraturan-peraturan tersebut, akan tetapi perusahaan tidak tinggal diam mengenai pelanggaran tersebut, perusahaan menetapkan dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan untuk menindaklanjuti tindakannya dan meluruskannya. Dan untuk pertanggungjawaban kepada karyawannya penulis menilai PDAM Bandarmasih telah memperlakukan karyawannya dengan baik, mereka telah memberikan fasilitas yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada para pekerjanya dan juga membangun divisi khusus untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

### 4. **Independensi**

PDAM Bandarmasih telah menerapkannya dengan baik, mereka telah menghindari *conflict of interest* dan dominasi dari pihak manapun. Hal tersebut penting untuk dilaksanakan demi melancarkan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Saat penelitian berlangsung PDAM Bandarmasih dalam beberapa kurun waktu ini tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemilik dikarenakan oleh berbagai hal sehingga untuk hal tersebut tertunda, akan tetapi PDAM Bandarmasih dapat mengelola perusahaan mereka sendiri dengan mandiri tanpa adanya penyertaan modal tersebut, tindakan perusahaan dengan mengandalkan kemampuan yang dimilikinya, melaksanakan investasi dari keuntungan yang didapat serta hal yang lainnya membuat perusahaan masih dapat berjalan tanpa adanya penyertaan modal dari pemilik.

Dalam menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan PDAM Bandarmasih dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, hal tersebut merupakan hal yang tepat dalam pengambilan keputusan yang baik serta objektif karena musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, jujur, saling memberi atau menerima masukan serta masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama (Islamey: 2011). Selain itu dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, setiap organ perusahaan memiliki SOP yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku demi menghindari terjadinya dominasi antar organ perusahaan dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

### 5. **Kesetaraan dan Kewajaran**

PDAM Bandarmasih telah menerapkannya dengan baik, perusahaan menghindari perlakuan yang tidak setara kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pendapatnya kepada perusahaan demi kebaikan perusahaan dan dalam setiap pengambilan keputusan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* serta terbuka. Menurut pandangan penulis PDAM Bandarmasih memperlakukan diri mereka sendiri sebagai pelayan kepada masyarakat dan khususnya *stakeholders*, ini sesuai dengan posisi PDAM sebagai BUMD yang *public*

*service oriented*, jadi dalam memberikan perlakuan kepada para pemangku kepentingan itu dilakukan secara setara dan wajar. Selain itu PDAM Bandarmasih juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pegawai tanpa memandang suku, agama, ras, golongan gender, dan kondisi fisik. PDAM Bandarmasih menurut penulis telah memberikan kesempatan untuk berkarir dengan baik karena mereka memandang prestasi dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai.

PDAM Bandarmasih secara keseluruhan telah menerapkan GCG di perusahaannya dengan baik meskipun ada beberapa poin yang perlu perbaikan, maka dengan ini penulis berpandangan bahwa keberadaan PDAM Bandarmasih yang saat penelitian ini dilaksanakan telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran akan mengalami kesinambungan (*sustainibillity*) dalam usahanya. Sesuai dengan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Kominte Nasional Kebijakan Governance, Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## KESIMPULAN

1. Perusahaan telah menyediakan informasi secara terbuka dengan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah didapat kepada para pemangku kepentingan dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan.
2. Perusahaan telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja masing-masing organ perusahaan semua karyawan secara jelas, meyakini setiap organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan yang sesuai dan telah memiliki sistem pengendalian internal
3. Perusahaan berusaha untuk dalam kegiatannya selalu didalam koridor peraturan yang berlaku dengan menerapkan SOP disetiap organ perusahaannya yang sesuai dengan
4. Peraturan yang berlaku dan telah memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan telah dikelola secara mandiri tanpa dominasi, benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan.
5. Perusahaan telah memperlakukan para stakeholdernya dengan adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik

## Daftar Pustaka

- Alex, Go. 2014. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. Surya Bangun Jaya Abadi (Terwaralaba Ray White). AGORA Vol. 2 No. 2
- Anto, J. (2015, November 26) Komitmen PDAM Bandarmasih Wujudkan Tata yang Baik : <http://www.bpkp.go.id/berita/read/15251/10/Komitmen-PDAM-Bandarmasih-Wujudkan-Tata-Kelola-yang-Baik-.bpkp>
- Fitriyani, Dewi, dkk. 2014. Praktik Good Corporate Governance Pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)
- Ghalib, Saladin. 2018. Good Corporate Governance Rating And Bank Profitability In Indonesia : Evidence From Panel Data. *International Journal Business and Society* . Vol. 19 No. 3
- Harmanto Edy Jatmiko. 2001. "Saatnya Menjadi Perusahaan Terpercaya". Swasembada. No. 19/XVII.
- I Nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat dan Bambang Soembodo. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum GCG Indonesia, Jakarta.
- Kuswandi, Novieka dan Ratih Indriyani. 2018. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga PT X. *Jurnal. Surabaya : Universitas Kristen Petra*
- Maradesa, Cicilia Citra dan James D.D Massie The Implementation Of Good Corporate Governance In Nonprofit Organization At Unit Transfusi Darah. *Jurnal EMBA Vol. 7 No.4*
- Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 No.1
- Marliyani, Rista. 2013. The Impact Of Implementation Of Good Corporate Governance Principles In A Property Development Company. Skripsi. Cikarang: President University
- Mediaty, dkk. 2016. Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance at PT Nusantara Infrastructure Tbk. Information Management and Business Review. Vol. 8. No. 2
- Menteri BUMN RI. 2002. Surat Menteri BUMN No.Kep-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Nurhayati, Eka Putri 2014. Analysys Of The Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) Principles And It's Relation To PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Bekasi Branch Performance) Skripsi. Cikarang: President University
- Prihatiningsih. 2010. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta Berdasarkan Balanced Performance Measurement. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Rizky, Adienda, dkk. 2019. Analisis Implementasi Good Corporate Governance di PT Terminal Teluk Lamong. The International Journal of Applied Business. Vol 1. No. 2
- Saleh, Muhammad, dkk. 2017. Analisis Hasil Kinerja PDAM Dalam Upaya Meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan. AT-TARIDHI Jurnal Studi Ekonomi. Vol. 8 No.f
- Syuaimi , Rahman. 2019. Perempuan Dan Partai Politik (Studi Kaderisasi Perempuan di DPD PAN Kota Banjarmasin. Proposal Skripsi. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Trihapsari, Elisa. 2006. Analisis Korelasi Antara Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Manajemen Laba Pada Emiten Di Bursa Efek Jakarta. Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro